PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SERUYAN

Jl. Moh. Hatta Nomor Telp./Facs. (0538) 2022310Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Email : kesbangpolinmasseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

Kuala Pembuang, Juli 2025

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penulahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b bahwa sehubungan telah ditandatangani Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kaimgan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

KETIGA : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 JUN 2025

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELAMORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 364 /2025
TANGGAL 29 JUNI 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANOKWANDA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Atas dasar ini RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan berikut dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RENSTRA Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

Kuala Pembuang, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan,

LIPINUS, SE.
Pembina Tk. I
NIP. 19770413 200604 1 013

DAFATAR ISI

Uraian			Halaman
HALAMAN JUDUL			i
KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR TABEL			iv
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	8
	1.4.	Sistematika Penulisan	9
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		10
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3.	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		40
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
	3.3.	Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		52
BAB V	PENUTUP		58

DAFTAR TABEL

Uraian

Tabel 2.1.	Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026
Tabel 2.2.	Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tabel 2.5.	Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Seruyan
Tabel 2.6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026
Tabel 3.2.	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026
Tabel 4.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Pada Aplikasi SIPD-RI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rancangan Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Renja merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2025-2029, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tersebut ke dalam rencana program/kegiatan/subkegiatan dan penganggaran

tahunan. Kedua dokumen perencanaan strategis jangka menengah tersebut adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dokumen perencanaan strategis teknis dimaksud mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RENJA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, Merujuk pada RPJPD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA". Dengan demikian, bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang disusun ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 adalah memberikan arah kebijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan 2025–2029.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;

4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Tahun 2026 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
5. Tersedianya acuan bagi pemangku peran *(stakeholder)* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan publik;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disajikan dalam 5 (*lima*) Bab dan masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari sub kegiatan/kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran *(Output)*, merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil *(Outcome)*, merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal tahun 2025 merupakan tahun awal dari Periode Renstra 2025-2029, maka tahun 2026 merupakan tahun pertama sekaligus tahun kedua dari Renstra Tahun 2025-2029. Pada Tahun 2024 dengan capaian kinerja Renja sampai dengan akhir triwulan IV sebesar 135,58% dan realisasi keuangan sebesar 95,95%. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL

RENJA 2026

Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026 dan adalah sebagaimana Tabel 2.1 dan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026

			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kewenangan Daerah	**Tersedianya Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang**	**[illegible]**	**Paket**	**[illegible]**				**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**	
			[illegible]	Jumlah Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	[illegible]	Laporan	[illegible]			Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]			Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	Jumlah Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kewenangan Daerah	[illegible]	Laporan	[illegible]			Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	Laporan	[illegible]			Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Administrasi Pemerintahan Umum	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum yang**	**[illegible]**	**Paket**	**[illegible]**				**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**		**[illegible]**	
			[illegible]	Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Disediakan	[illegible]	Paket	[illegible]			Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	Paket	[illegible]			Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	Jumlah Paket Fasilitasi Pelayanan Kantor [illegible]	[illegible]	Paket	[illegible]			Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		Administrasi Kecamatan Penajam Barat Barat yang Berkaitan	**Pemenuhan Administrasi Kecamatan Penajam Barat yang Berkaitan**	**00 Paket**	**03.244.000**				**99.244.000**		-		**32.000.376**		**03.642.500**		**2.250.000**		**02.029.376**		**32.329.376**	**0,00**	**10,33**

RENJA 2026

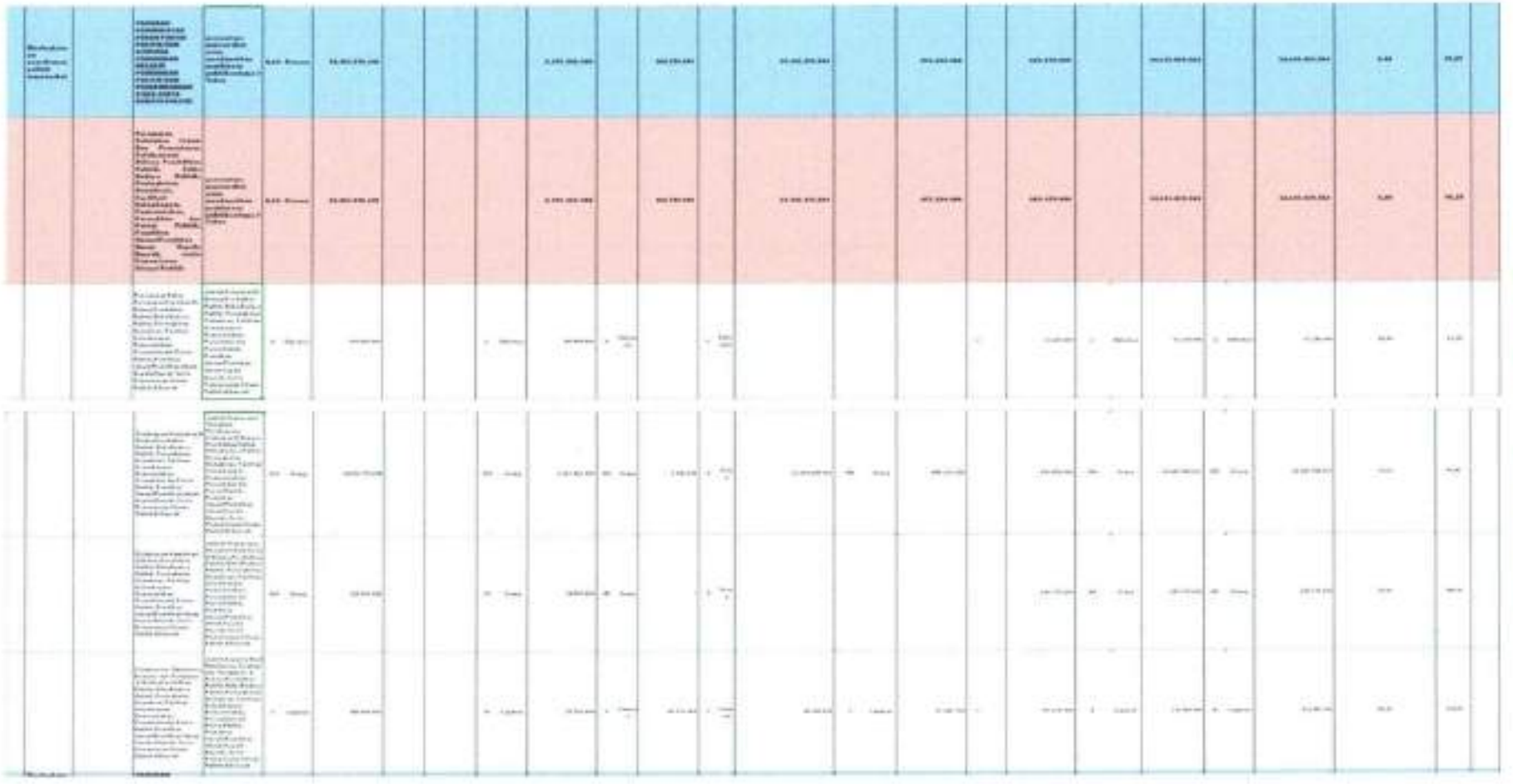

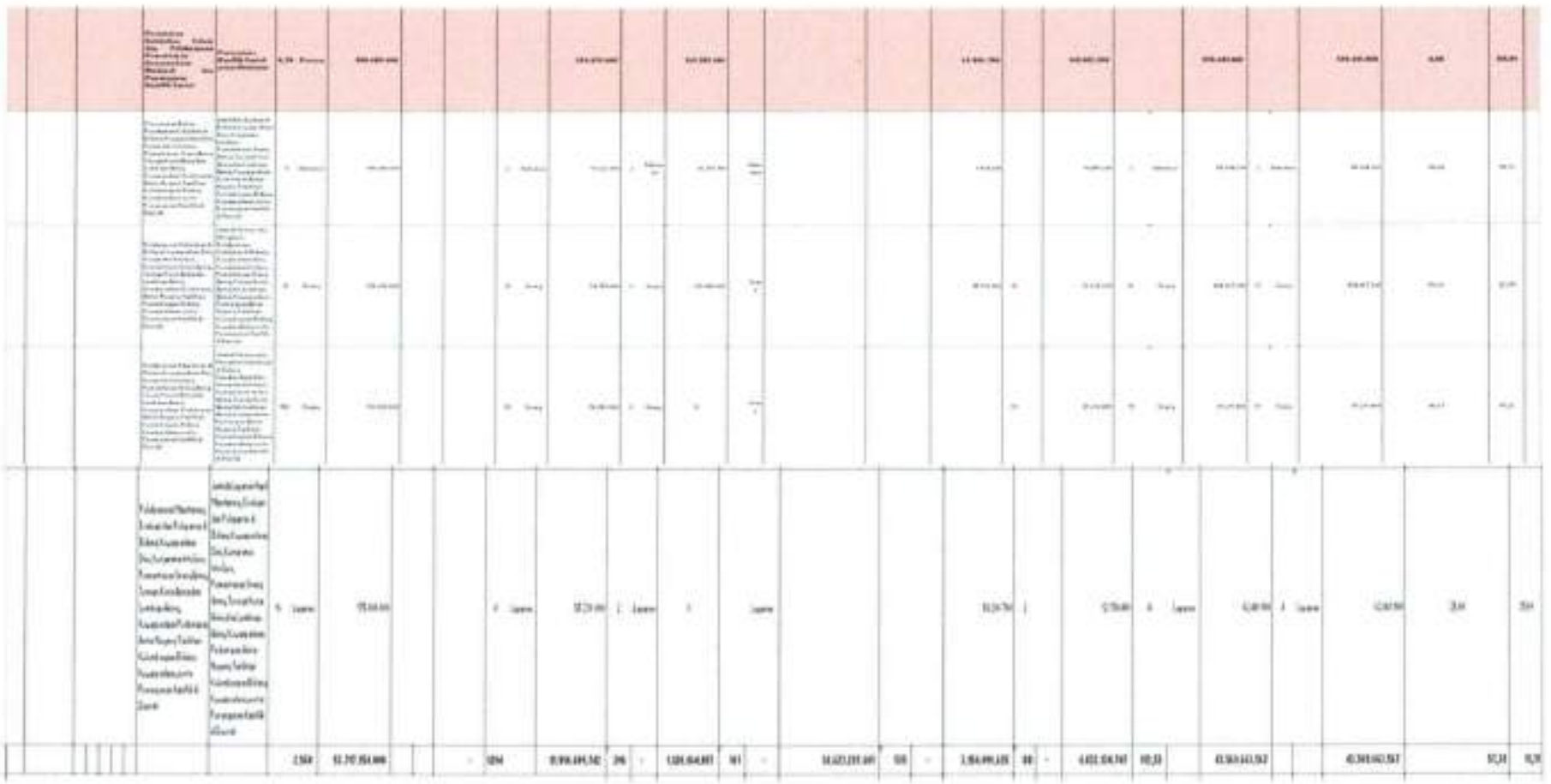

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut di atas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Periode 2025-2029 pada Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana 120 orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.526.600,- dengan capaian 92,29%.
  b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana 8 Orang dengan capaian 8.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.884.400,- dengan capaian 57,71%.
  c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 133,33% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.131.200,- dengan capaian 96,36%.
  d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka untuk realisasi fisik yang terlaksana 71 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.030.868.128,- dengan capaian 94,62%.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
  a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun untuk realisasi fisik yang terlaksana 2 Dokumen dengan capaian 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.794.300,- dengan capaian 80,37%.
  b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 13 Orang dengan capaian 118.18% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.232.200,- dengan capaian 97,81%.
  c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan

RENJA 2026

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 70 Orang dengan capaian 70% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.218.400,- dengan capaian 94,59%.

d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.461.100,- dengan capaian 87,44%.

3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya politik.

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

  a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun, untuk realisasi fisik yang terlaksana 2 Dokumen

RENJA 2026

dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.248.000,- dengan capaian 76,83%.

b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 250 Orang dengan capaian 227,27% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.042.744.268,- dengan capaian 98.64%.

c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 40 Orang dengan capaian 30% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 248.879.200,- dengan capaian 88,09%.

d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di

Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.276.900,- dengan capaian 87,53%.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
     a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 285 Orang dengan capaian 166,66% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.215.700,- dengan capaian 73,95%.
     b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 80 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.124.700,- dengan capaian 22,93%.
     c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 50.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.768.000,- dengan capaian 22.51%.

5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun, untuk realisasi fisik yang terlaksana 2 Dokumen dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.618.992,- dengan capaian 70,96%.
  b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 155 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 680.973.000,- dengan capaian 52,51%.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
     a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 8 Dokumen dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.497.100,- dengan capaian 96.98%.

b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- dengan capaian 100%.

c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.900.000 dengan capaian 100%.

d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, untuk realisasi fisik yang terlaksana 24 Orang dengan capaian 104.35% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.367.189.617,- dengan capaian 96.16%.

e. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9,350,000,- dengan capaian 100%.

f. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53,429,303,- dengan capaian 71.26%.

g. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 680,979,406,- dengan capaian 95.57%.

h. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53,519,400,- dengan capaian 99.72%.

i. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13,920,000,- dengan capaian 99.43%.

j. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6,814,250,- dengan capaian 100%.

k. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11,925,000,- dengan capaian 100%.

l. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7,120,200,- dengan capaian 98.04%.

m. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 8 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13,280,000,- dengan capaian 99.85%.

n. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 3 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 123,303,550,- dengan capaian 99.55%.

o. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk realisasi fisik yang terlaksana 182 Laporan dengan capaian 202.22% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 398,131,557,- dengan capaian 82.75%.

p. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 3 Unit dengan capaian 30% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38,500,000,- dengan capaian 100%.

q. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Unit dengan capaian 40% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62,950,600 dengan capaian 92.14%.

r. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Unit dengan capaian 24% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38,943,000,- dengan capaian 97.37%.

s. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 53 Paket dengan capaian 92.98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118,614,000,- dengan capaian 99.91%.

t. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2024, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 13 Orang dengan capaian 216.67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 144,215,296,- dengan capaian 92.64%.

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra OPD yang dicapai pada tahun 2025			Realisasi Capaian Renstra pada Triwulan I Tahun 2025		Target Akhir Renstra yang dicapai pada Tahun 2025		Realisasi Renja yang akan dicapai							Rata-rata Capaian Renstra yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Renstra yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025		Unit Penanggung Jawab
												I		II		III		IV							

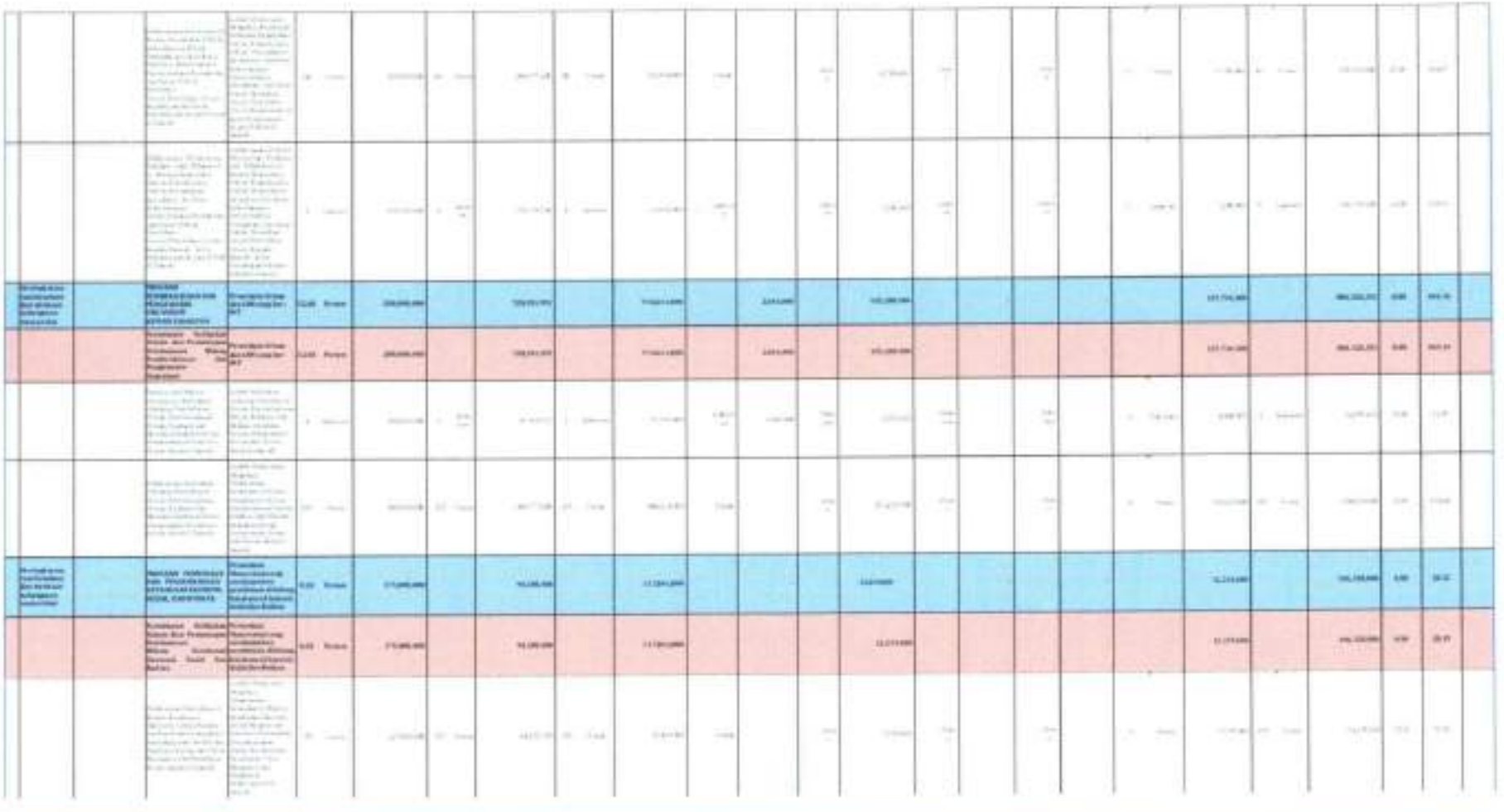

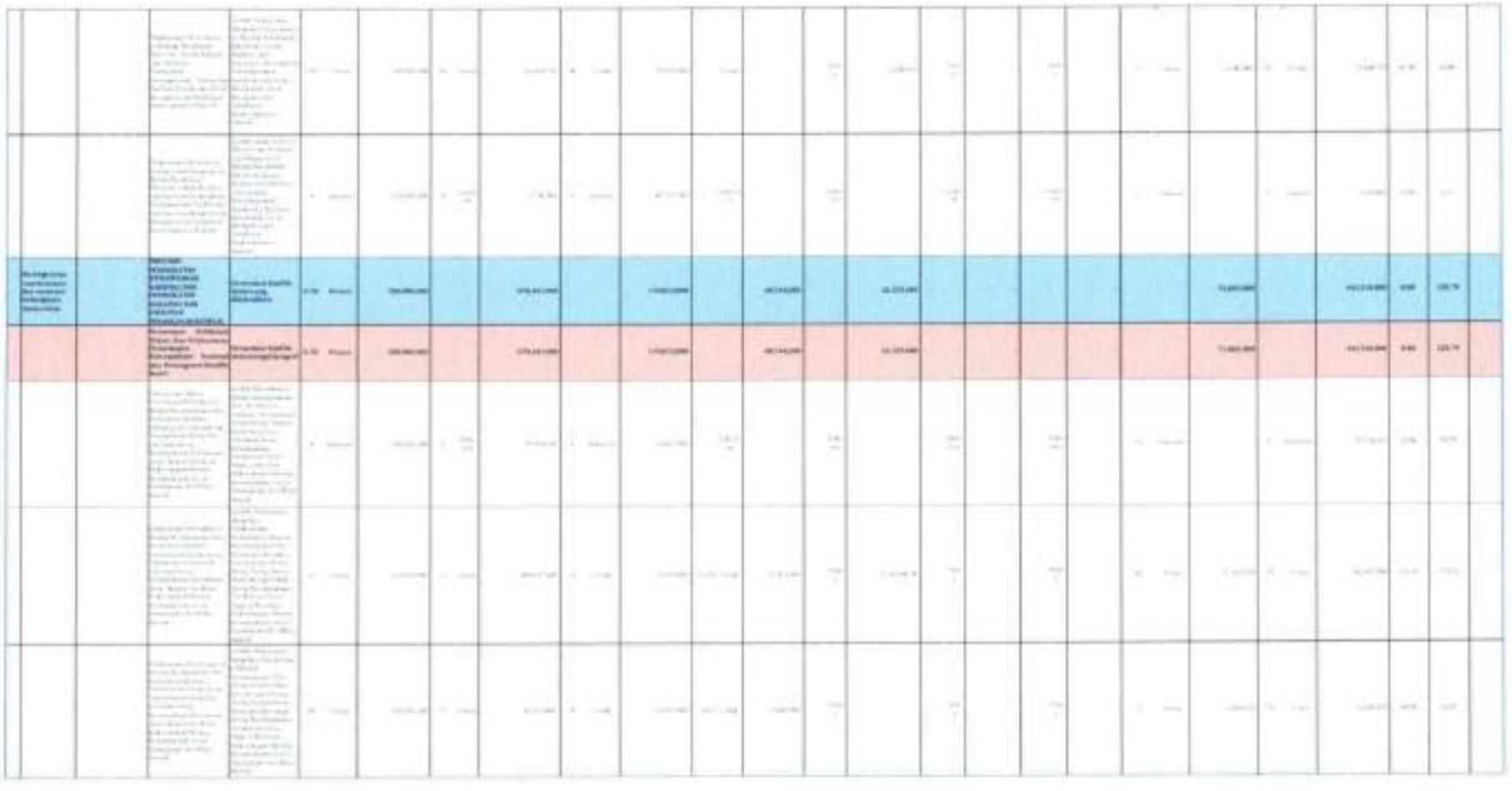

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *tidak memenuhi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan.

   1) Pada RENJA-PD Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan merencanakan 6 Program (5 Program Teknis dan 1 Program Non-Teknis), 12 Kegiatan (5 Kegiatan Teknis dan 7 Kegiatan Non-Teknis) dan 39 Sub Kegiatan (17 Sub Kegiatan Teknis dan 22 Sub Kegiatan Non-Teknis).

   2) Dari Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu:

   a. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 0% dan realisasi kinerja masih sebesar 0% dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan, dan masih ada 3 target kinerja sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

   b. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 0,31% dan realisasi kinerja sebesar 0,05 dengan persentase sebesar 16,56%, dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan, dan masih ada 3 target kinerja sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

   c. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 0.38% dan realisasi kinerja sebesar 0.19% dengan persentase sebesar 51.15%, dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan, dan masih ada 3 target kinerja sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

   d. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

      dilihat dari target kinerja program sebesar 0.34% dan realisasi kinerja sebesar 0.12 dengan persentase sebesar 36.37%, dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah

ditentukan, dan masih ada 2 target kinerja sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

2. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *telah memenuhi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan.**

3. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   a. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 49,50% dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 42.43% dan persentase capaian kinerja sebesar 105.91% dimana angka ini telah melebihi dari target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.**
   - Faktor-faktor penyebab *tidak tercapainya* atau *belum tercapai sepenuhnya target kinerja* program/kegiatan, antara lain :
     - Kurangnya akuratnya data yang dimiliki oleh bidang terkait, sehingga menyebabkan belum tercapainya target.
     - Luasnya wilayah kerja dan terbatasnya anggaran serta
     - Sumberdaya manusia yang menjalankan uraian tugas dan fungsi maupun kegiatan yang diberikan masih belum optimal.
   - Faktor-faktor penyebab *terpenuhinya target kinerja* program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain :
     - Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pencapaian target kinerja serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   - Faktor-faktor penyebab *melebihi target kinerja* program/kegiatan, antara lain :
     - Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pencapaian target kinerja serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**
   - Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan dengan RAK, maka akan berimplikasi terhadap capaian kinerja pertriwulan termasuk penyerapan anggaran, sehingga pada akhir periode anggaran diharapkan realisasi kinerja program/kegiatan

minimal tercapai 100% yang juga akan berimplikasi terhadap capaian target program Renstra PD.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**
   - Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap target Renstra PD dapat tercapai.
   - Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN

Adanya pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan untuk mengakomodir adanya perubahan asumsi dari asumsi awal rencana kerja yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, serta adanya perubahan Standar Biaya Umum (SBU) sehingga terjadi perubahan perhitungan dalam pelaksanaan kegiatan.

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan. (belum diperbaiki)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2025-2029 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan 2025-2029.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan 2025-2029, bahwa dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan " terdapat keselarasan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

pada RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 dengan Renstra PD Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Memelihara Stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peningkatan Toleransi Beragama, Wawasan Kebangsaan, Kesadaran Hukum, dan Partisipasi Politik yang Demokratis	Meningkatkan Kualitas Toleransi Umat Beragama, Pemahaman Politik Masyarakat dan Kewaspadaan Dini Daerah serta Implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila	1. INDEKS HARMONI	6.69	6.71	6.72	6.73	6.74	6.80
		1. IKUB	4	4	4.05	4.1	4.15	4.2
		2 Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	0.38	0.38	0.51	0.65	0.81	0.96
		3 Angka Kriminalitas	7.45	7.30	7.15	7.00	6.85	6.70
		4 Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	0.47	0.72	0.97	1.25	1.54

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diatas, maka Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2025-2029 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Pembinaan Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (%).	4.6	4.75	4.8	5	N/A	0.14	17.73	0.25	0.38	N/A	3.04	373.26	5.10	7.60	N/A
	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan selama 5 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	0.14	N/A	N/A	N/A	N/A	0.14	N/A	N/A	N/A	N/A	100
2	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan (%).	80	90	90	100	50	0	5	50	50	25	0	5	56	50	25
3	Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik (%)	4.6	4.75	4.9	5	N/A	0.56	5.58	0.75	4.89	N/A	12.17	117.47	15.12	98.00	N/A
	Persentase Masyarakat yang mencapatkan Pembinaan Politik selama 5 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18	N/A	N/A	N/A	N/A	0.27	N/A	N/A	N/A	N/A	150
4	Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi (%)	4.6	4.75	4.9	5	N/A	1.96	-71.15	250.56	14.07	N/A	42.61	-1497.89	5115.51	281.40	N/A
	Presentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya selama 5 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	0.17	N/A	N/A	N/A	N/A	0.24	N/A	N/A	N/A	N/A	141.18
5	Persentase Ormas Dan Lsm Yang Ber Skt	N/A	58.37	12.64	78.91	46.53	N/A	78.12	50	44.79	51.62	N/A	115.72	68.65	56.24	111.59

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik

1. Analisis Tingkat Kinerja

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dari tahun 2024 s/d Tahun 2025 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu:

1) Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
2) Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

RENJA 2026

3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam perencanaan pembangunan.
4) Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
6) Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Seruyan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
8) Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
9) Belum terpenuhinya formasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai dengan struktur perangkat daerah.
10) Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

2. **Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang diKabupaten Seruyan dapat dikemukakan beberapa Isu-Isu strategis terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan

ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi dan kemasyarakatan.

2. Pemahaman dan Ideologi Radikal yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pancasila tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh generasi muda;
4. Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi;
5. Adanya Perbedaan Budaya Yang Mengakibatkan Ketidakpahaman Dan Komunikasi Antar Budaya Yang Terbatas Menjadi Pemicu Konflik Dengan Latar Belakang Keragaman Etnis, Maupun Agama;
6. Dampak Kebijakan Pemerintah Akan Arus Globalisasi Terhadap Ketahanan Budaya;
7. Keberagaman dan potensi afiliasi politik ormas;
8. Terhambatnya kanal aspirasi Ormas dalam perumusan kebijakan publik;
9. Rendahnya Apresiasi Dan Minat Generasi Muda Terhadap Seni Budaya Tradisional Berbanding Terbalik Dengan Maraknya Budaya Asing;
10. Ruang publik yang tidak sehat dan tidak demokratis;

11. Kewaspadaan Dini terkait isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme;
12. Forkopimda;
13. Peraturan terkait penanganan konflik pemerintahan yang belum tersedia. Hal tersebut jika tidak teratasi akan mengakibatkan perpecahan atau konflik yang lebih besar;
14. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada KESBANGPOL untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
15. Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
16. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cendrung menurun ;
17. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
18. Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada KESBANGPOL;
19. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur KESABNGPOL dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Disamping itu juga, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranhir Renja-PD) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Program dan kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seruyan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Rancangan Awal Renja-PD yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Awal dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan sebelum ditetapkannya RKPD Kabupaten Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Seruyan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Seruyan

NO	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
A.	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9,794,236,354.00	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13,601,465,000.00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	6,342,237,630	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	8,456,465,000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	156,467,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	156,467,000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KalTengKab. Seruyan	8 Dokumen	109,990,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KalTengKab. Seruyan	8 Dokumen	109,990,000
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	29,995,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	29,995,000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	14,982,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	14,982,000
4.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	2 Data	1,500,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	2 Data	1,500,000

2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**4,556,969,076.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**6,003,600,000.00**
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	23 Orang	4,553,769,076.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	23 Orang	6,000,000,000.00
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	5 Laporan	3,200,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	5 Laporan	3,600,000.00
3.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**791,389,729**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**772,000,000**
5.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 Laporan	11,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 Laporan	12,000,000
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	76,190,385	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	80,000,000
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	632,117,344	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	600,000,000.00
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Laporan	71,999,300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Laporan	80,000,000
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**420,698,100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**510,000,000**
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Paket	30,960,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Paket	20,000,000
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	9,309,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	15,000,000
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	11,978,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	25,000,000
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	11,998,200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	20,000,000

13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serayan	8 Paket	11,900,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serayan	8 Paket	20,000,000
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serayan	3 Paket	122,478,300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serayan	3 Paket	160,000,000
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	249,874,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	250,000,000
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksanaya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**115,350,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksanaya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**299,605,000**
16.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Serayan	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Serayan	1 Unit	-
17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Serayan	10 Unit	115,350,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Serayan	10 Unit	150,000,000
6.	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**149,768,925**	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**335,000,000**
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serayan	10 Unit	87,990,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serayan	10 Unit	110,000,000
19.	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serayan	50 Unit	43,090,000	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serayan	50 Unit	75,000,000
20.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Serayan	1 Unit	18,668,925	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Serayan	1 Unit	150,000,000

7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		100%	143,699,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		100%	365,000,000
21.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	57 Paket	74,326,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	57 Paket	185,000,000
22.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	50,000,000
23.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	69,179,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	130,000,000
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan		0.53	1,372,974,724.00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan		0.53	1,672,974,724.00
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100.00	1,372,974,724.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100.00	1,672,974,724.00
24.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	130 Orang	182,219,500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	130 Orang	182,219,500
25.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	50 Orang	36,678,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Seruyan	50 Orang	56,678,000

26.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bideng Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Seruyan	4 Laporan	34,598,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	34,598,000
27.	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Seruyan	71 Orang	1,099,479,224	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Seruyan	71 Orang	1,399,479,224
III.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik**		**0.38**	**1,344,841,500.00**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik**		**0.38**	**2,300,000,000.00**
9.	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**100.00**	**1,344,841,500.00**	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**100.00**	**2,300,000,000.00**
28.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Dimasuk	Kab. Seruyan	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Dimasuk	Kab. Seruyan	2 Dokumen	50,000,000

29.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	140 Orang	1,370,951,300	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	140 Orang	2,100,000,000
30.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	60 Orang	84,352,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	60 Orang	100,000,000
31.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	39,336,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	50,000,000
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	INDEKS KINERJA ORMAS		60.00	187,642,800.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	INDEKS KINERJA ORMAS		60.00	100,000,000.00
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif		47.33			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif		47.33	
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang mendapatkan Pembinaan terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM		62.50	187,642,800.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang mendapatkan Pembinaan terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM		62.50	100,000,000.00

32.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	104 Orang	113.000,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	104 Orang	50,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	20 Orang	36.950.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	20 Orang	
33.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	35.692.800	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	50.000.001
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**		**4.00**	**184.302.000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**		**4.00**	**200.000.000.00**
33.	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**		**100.00**	**184.302.000.00**	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**		**100.00**	**200.000.000.00**
34.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	100 Orang	67,462,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	100 Orang	75.000.000

35.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80 Orang	50.000.000
36.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	66.340.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	75.000.000
VI.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.**		**70.00**	**312.577.900.00**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.**		**70.00**	**275.000.000.00**
12.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**100.00**	**312.577.900.00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**100.00**	**275.000.000.00**
37.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Ditanan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	5 Dokumen	18.345.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Ditanan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	5 Dokumen	50.000.000

38.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	12 Orang	80,535,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab Seruyan	12 Orang	50,000,000
39.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	75 Orang	77,854,300	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	75 Orang	75,000,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	60,863,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	100,000,000
40.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 Dokumen	74,740,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 Dokumen	101,000,000
JUMLAH					**9,744,236,354.00**					**13,004,439,726.00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan berdasarakan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Seruyan khususnya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025, bahwa tidak terdapat usulan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.6.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Tidak Ada Usulan				

Adapun usulan para pemangku kepentingan adalah sebagai bahan/informasi dalam penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam RENJA Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana diuraikan berikut.

3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Melalui bidang ini usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional

RENJA 2026

Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik;
- Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Revitalisasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dalam Penguatan dan Kesatuan; dan
- Penyelenggaraan Peningkatan Kesadasaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang terdiri atas 4 subkegiatan, yaitu:
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
     - Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka.

4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Melalui bidang ini usulan program dan kegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik social tingkat kabupaten/kota;
- Pendanaan konflik faktual;
- Pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan;
- Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusast komunikasi sesuai dengan amanat Permendagri No. 2/2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46/2019 tentang Perubahan atas Permendagri No. 2/2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, Lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing;
- Peningkatan SDM aparatur kesbangpol di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui Pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2008;
- Pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, dan

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

2. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri atas 4 subkegiatan, yaitu:
     - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
     - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
     - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
     - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

RENJA 2026

5) Bidang Politik Dalam Negeri

Melalui bidang ini usulan program dan kegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata Kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : "Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum" Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 2 (dua) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik Kinerja Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Penguatan Ketahanan Ekologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1 indikator);
2. Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (3 indikator);

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Permendagri 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri Pasal 116 dan 117). Menurut Pasal 116 mempunyai tugas Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra

suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu)

RENJA 2026

tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan menetapkan 1 (satu) **Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029**, yaitu :

" Memelihara Stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peningkatan Toleransi Beragama, Wawasan Kebangsaan, Kesadaran Hukum, dan Partisipasi Politik yang Demokratis "

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusanyang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. **Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026**, sebagai berikut :

Meningkatkan Kualitas Toleransi Umat Beragama, Pemahaman Politik Masyarakat dan Kewaspadaan Dini Daerah serta implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila Meningkatnya pemahaman politik masyarakat

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2025-2029 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi/Rumus Indikator	Satuan	Target
1.	Memelihara Stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peningkatan Toleransi Beragama, Wawasan Kebangsaan, Kesadaran Hukum, dan Partisipasi Politik yang Demokratis	1. Meningkatkan Kualitas Toleransi Umat Beragama, Pemahaman Politik Masyarakat dan Kewaspadaan Dini Daerah serta implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila	1. INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL	Hasil Survey	Indek	60
			2. Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik / Jumlah Penduduk x 100%	Persen	0.38
			3. Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya /Jumlah Masyarakat yg berusia minimal 15 Tahun x 100%	Persen	0.47

3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2026. Perencanaan program dalam dokumen Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2026, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan tersusunnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta Perubahannya pada setiap tahun rencana selama periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan 2025-2029 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini memuat **6** ***(enam)*** **Program** (5 Program Teknis dan 1 Program Non-Teknis) dan **12** ***(dua belas)*** **Kegiatan** (5 Kegiatan Teknis dan 7 Kegiatan Non-Teknis) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pencapaian *visi* dan *misi* Kepala Daerah, didalamnya juga memuat amanat Presiden melalui Perpres tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yan Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila. Perumusan sub kegiatan pada setiap kegiatan dan program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap sub kegiatan dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta pencapaian *visi* dan *misi* RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Lokasi kegiatan pada tahun rencana 2026 sebagian besar mendukung pengentasan desa/keluran desa tertinggal atau sangat tertinggal sebagaimana yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra yang terkait dengan rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan *(pagu indikatif)* tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Matrik Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sumber Dan Apbd Kabupaten Seruyan

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Tahun 2027		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
A.	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9,744,236,354.00		9,825,940,886.00	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	6,342,237,830	100.00%	6,322,890,064	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	156,467,000	100%	156,500,000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KalTengKab. Seruyan	8 Dokumen	109,990,000	8	110,000,000	
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	29,995,000	4	30,000,000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	14,982,000	4	15,000,000	
4.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	2 Data	1,500,000	2	1,500,000	

2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**4,556,969,076.00**	**100%**	**4,576,838,310.00**	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	23 Orang	4,553,369,076.00	23 Orang	4,561,838,310.00	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	5 Laporan	3,600,000.00	5 Laporan	15,000,000.00	
3.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**791,305,729**	**100%**	**792,405,729**	
5.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	12,100,000.00	
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	76,199,185	12 Laporan	76,199,185.00	
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	632,117,244	12 Laporan	632,117,244.00	
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Laporan	71,989,300	4 Laporan	71,989,300.00	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**428,698,100**	**100%**	**428,698,100**	
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Paket	10,960,000	4 Paket	10,960,000	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	9,509,000	1 Paket	9,509,000	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	11,978,400	1 Paket	11,978,400	
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	11,998,200	1 Paket	11,998,200	

30.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	60 Orang	84,552,000	60	84,583,000	
31.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Sitaasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	39,338,000	4	39,338,000	
IV.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**INDEKS KINERJA ORMAS**		**60.00**	**187,642,800.00**	**60.35**	**194,693,900.00**	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif		**47.53**		**48.53**		
10.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas dan LSM yang mendapatkan Pembinaan terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM**		**62.50**	**187,642,800.00**	**67.31**	**194,693,900.00**	
32.	Implementasi Kebijakan di Bidang Perlindungan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	104 Orang	115,000,000	104	119,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Orman dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	20 Orang	36,950,000	20	40,000,000	

33.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	35,692,800	4	35,693,900	
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**		**4.00**	**184,002,000.00**	**4.05**	**202,402,200.00**	
11.	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**		**100.00**	**184,002,000.00**	**100.00**	**202,402,200.00**	
34.	Implementasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	100 Orang	67,462,000	100	74,208,200	
35.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80 Orang	50,000,000	80	55,000,000	
36.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	66,540,000	4	73,194,000	

VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.		60.00	312,537,500.00	65.00	312,537,500.00	
12.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**100.00**	**312,537,500.00**	**100.00**	**312,537,500.00**	
37.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	3 Dokumen	18,345,000	3	18,345,000	
38.	Implementasi Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	12 Orang	81,535,000	13	Rp 81,535,000	
39.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	75 Orang	77,054,500	80	Rp 77,054,500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	60,863,000	4	Rp 60,863,000	
40.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 Dokumen	74,740,000	2	74,740,000	
JUMLAH					**9,744,236,354.00**		**9,825,940,886.00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 pada RENJA ini dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1., Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Seruyan Tahun 2026 dan Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Pada Aplikasi SIPD-RI berikut.

13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	8 Paket	11,900,000	8 Paket	11,900,000	
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 Paket	122,478,500	3 Paket	122,478,500	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	249,874,000	90 Laporan	249,874,000	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**115,350,000**	**100%**	**75,000,000**	
16.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Unit	-	1 Unit	-	
17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 Unit	115,350,000	10 Unit	75,000,000	
6.	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**149,748,925**	**100%**	**149,748,925**	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	10 Unit	87,990,000	10 Unit	87,990,000	
19.	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	43,090,000	50 Unit	43,090,000	
20.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1 Unit	18,668,925	1 Unit	18,668,925	

7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		100%	143,699,000	100%	143,699,000	
21.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	57 Paket	74,520,000	57 Paket	74,520,000	
22.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	-	2 Orang	-	
23.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	69,179,000	6 Orang	69,179,000	
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan		0.53	1,372,974,724.00	0.73	1,443,544,724.00	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100.00	1,372,974,724.00	100.00	1,443,544,724.00	
24.	Implementasi Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	130 Orang	182,219,500	140	182,219,500	
25.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	50 Orang	56,678,000	50	37,108,000	

26.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Seruyan	4 Laporan	34,598,000	4	24,738,000	
27.	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Seruyan	71 Orang	1,099,479,224	71	1,199,479,224	
III.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik**		**0.38**	**1,344,841,500.00**	**0.51**	**1,349,872,500.00**	
9.	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**100.00**	**1,344,841,500.00**	**100.00**	**1,349,872,500.00**	
28.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Seruyan	2 Dokumen	50,000,000	2	55,000,000	
29.	Implementasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	140 Orang	1,170,951,500	150	1,170,951,500	Hibah Parpol

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2026

Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9,744,236,354.00
8	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	100%	6,342,237,830
8	01	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	156,467,000
8	01	1	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	109,990,000
8	01	1	2	01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29,995,000
8	01	1	2	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14,982,000
8	01	1	2	01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	2 Data	1,500,000

8	01	1	2	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4,556,969,076.00**
8	01	1	2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	4,553,369,076
8	01	1	2	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3,600,000
8	01	1	2	08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**791,305,729**
8	01	1	2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,000,000
8	01	1	2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76,199,185
8	01	1	2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	632,117,244.00
8	01	1	2	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	71,989,300
8	01	1	2	06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**429,698,100**
8	01	1	2	06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,960,000
8	01	1	2	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,509,000
8	01	1	2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,978,400
8	01	1	2	06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan	1 Paket	11,998,200
8	01	1	2	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Paket	11,900,000

8	01	1	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	122,478,500
8	01	1	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	249,874,000
8	**01**	**1**	**2**	**07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**115,350,000**
	01	1	2	07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
8	01	1	2	07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115,350,000
8	**01**	**1**	**2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**149,748,925**
8	01	1	2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	87,990,000
8	01	1	2	09.06	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	43,090,000
	01	1	2	09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	18,668,925
8	**01**	**1**	**2**	**05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan**	**100%**	**143,699,000**
8	01	1	2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	74,520,000
8	01	1	2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-
8	01	1	2	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	69,179,000

8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	0.53	1,372,974,724
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00	1,372,974,724
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	130 Orang	182,219,500
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	86,678,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	34,598,000
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	71 Orang	1,099,479,224
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	0.38	1,344,841,500
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100.00	1,344,841,500

8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	50,000,000
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	1,170,961,500
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	84,552,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	39,338,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**INDEKS KINERJA ORMAS**	**60.00**	**187,642,800**
						Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif	**47.53**	

8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas dan LSM yang mendapatkan Pembinaan terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM**	**62.50**	**187,642,800**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	104 Orang	115,000,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	36,950,000
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	35,692,800
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**4.00**	**184,002,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**100.00**	**184,002,000**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	67,462,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	50,000,000

8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	66,540,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.**	**60%**	**312,537,500**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100%**	**312,537,500**
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	18,345,000
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	81,535,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75 Orang	77,054,500

8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspedaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	60,863,000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	74,740,000
JUMLAH								**9,744,236,354.00**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SERUYAN
TAHUN 2026

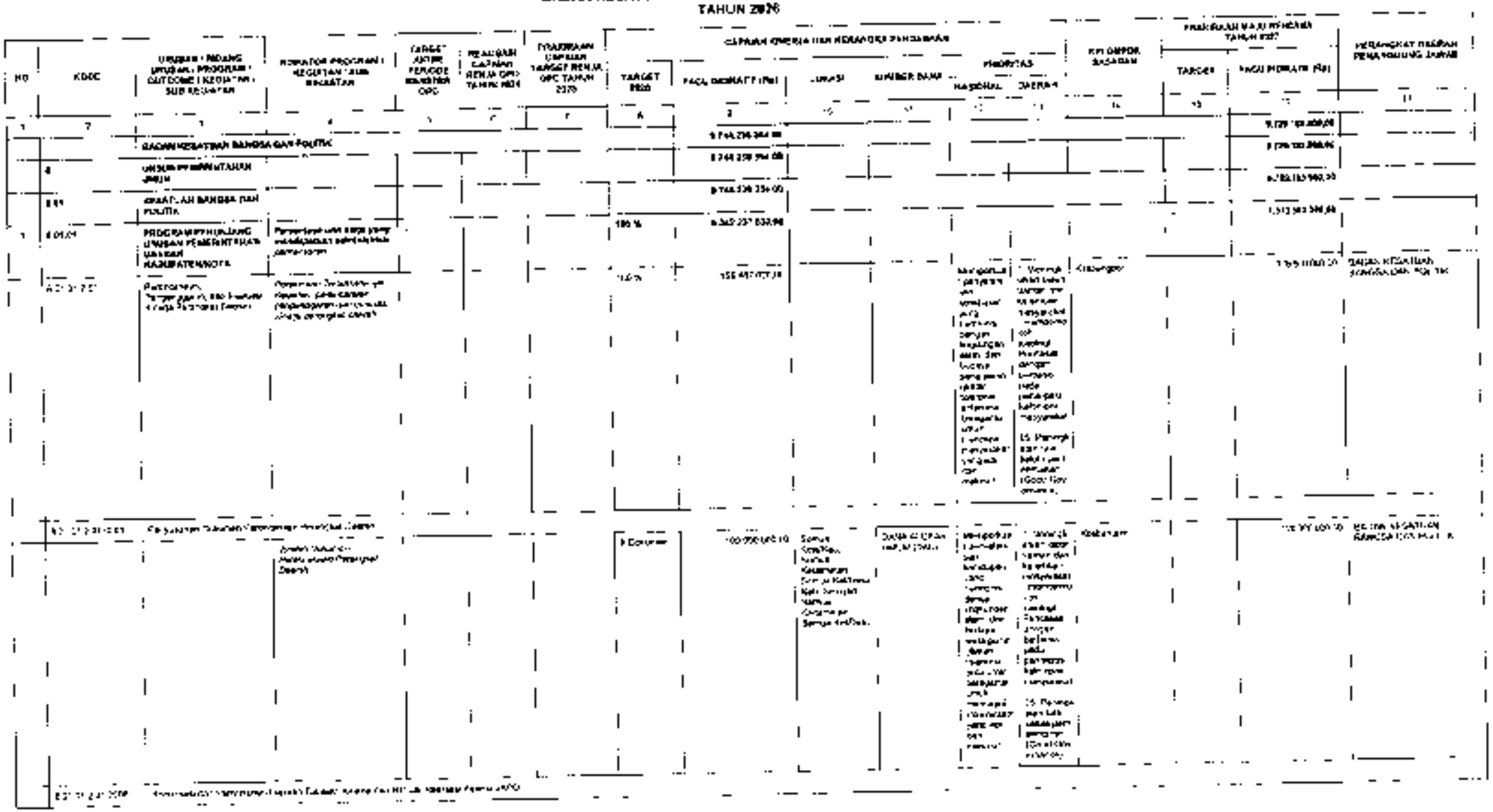

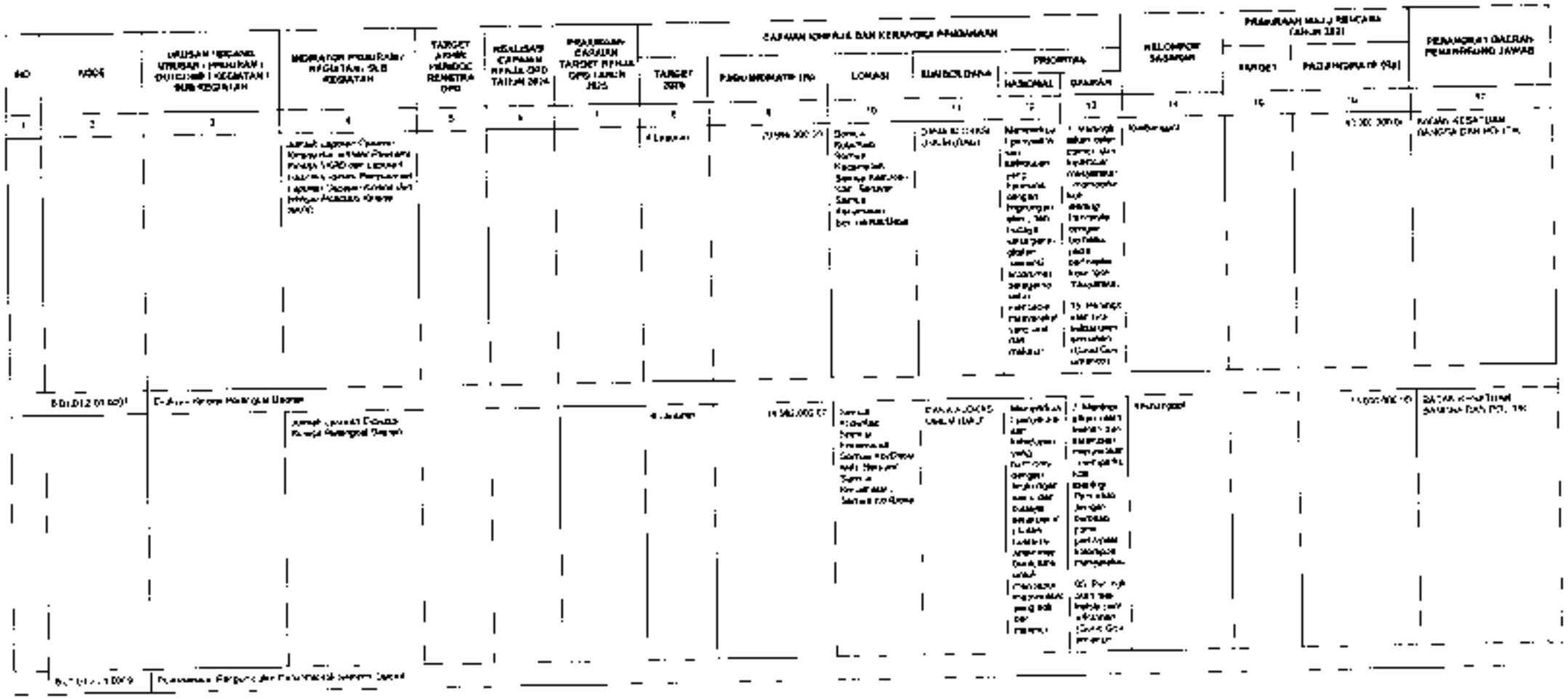

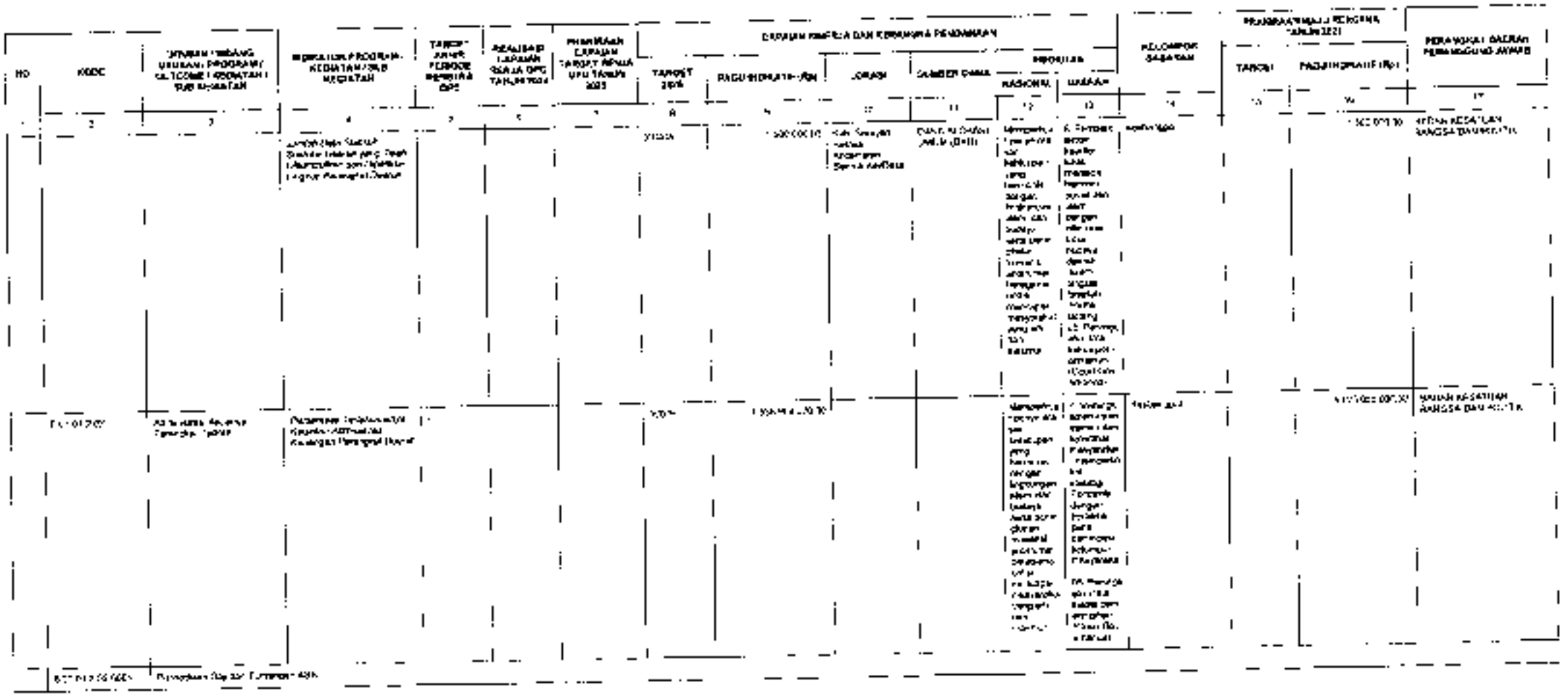

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN PERANGKA DAERAH OPD	REALISASI CAPAIAN SEBELUM OPD Tahun 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELUM PENCAPAIAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Target Awal	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Sumber Dana	PROGRAM			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Kode/Deskripsi	Output/Outcome				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Memerima Dalam Kelompok ASN				25 Orang/Jam	4.553.304.275,00	Kab. Sanjar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Dana ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan pemerataan sarana yang kompeten dengan mengurangi permasalahan dalam satu pelayanan kepada masyarakat Mempertahankan kualitas pelayanan yang ada Tahun	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tahun 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tahun 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tahun 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tahun Cacat dan seterusnya	Kelompok		5.705.305.305,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANJAR
	1.01.01.2.02.0001	Pendidikan dan Pelayanan Luar Biasa Tahun Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Tahun SKPD				4 Laporan	2.800.700,00	Kab. Sanjar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan pemerataan sarana yang kompeten dengan mengurangi permasalahan dalam satu pelayanan kepada masyarakat Mempertahankan kualitas pelayanan yang ada Tahun	1. Pemenuhan sarana sarana Tahun meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat Tahun 2. Pemenuhan sarana sarana Tahun meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat Tahun 3. Pemenuhan sarana sarana Tahun meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat Tahun Dan Seterusnya 4) Pemenuhan sarana sarana Tahun meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat Tahun	Kelompok		2.800.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

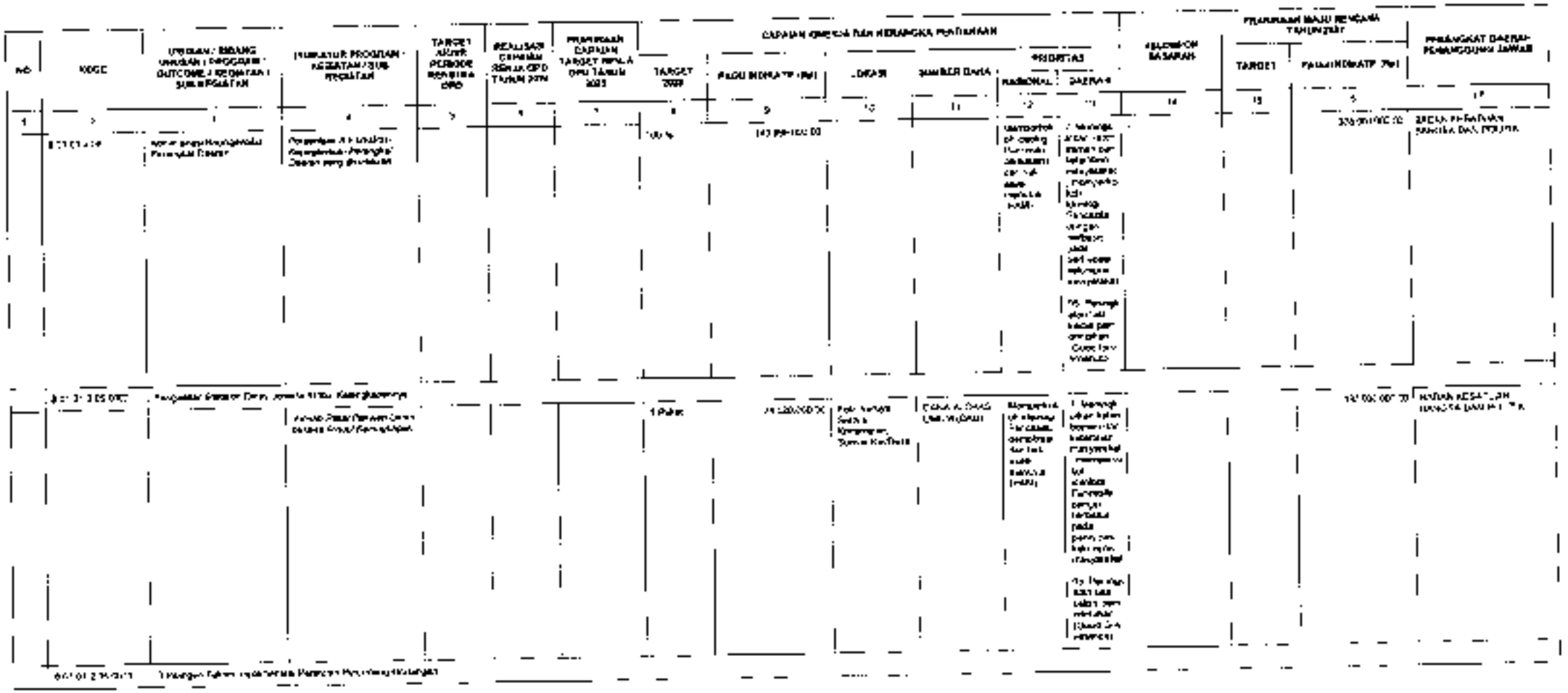

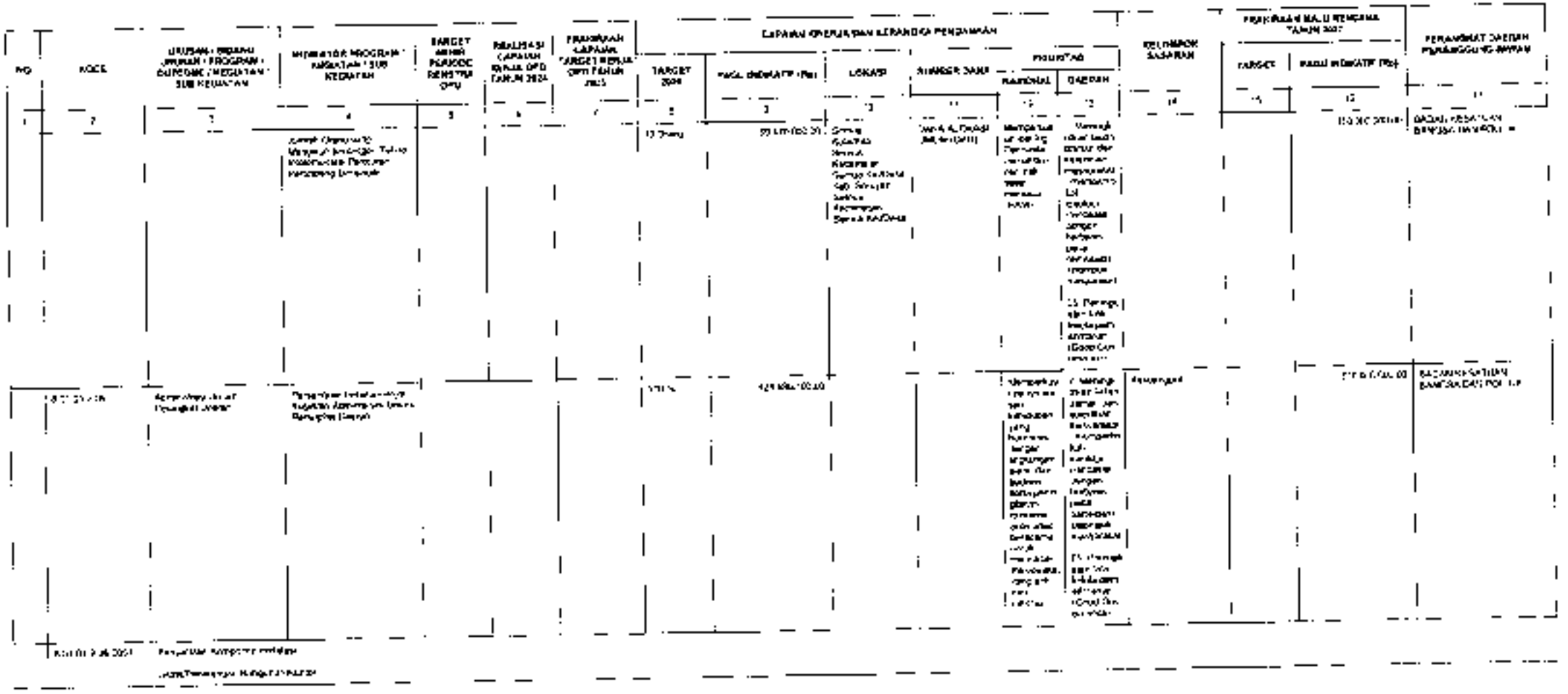

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Kelompok Sasaran	PROVINSI	LUAR DAERAH		Publikasi	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Pariwisata Perempuan Terlatih/Pendampingan Bidang Usaha Pariwisata yang Dilaksanakan				1 Paket	9.999.000,00	Kab. Sarolangun, Bupati, Kecamatan, Seluruh Kabupaten	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPORA)	Mengembangkan pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya	Masyarakat		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Pelaku Pariwisata Perempuan Terlatih/Pendampingan Bidang Usaha Pariwisata yang Dilaksanakan				1 Paket	11.919.406,00	Kab. Sarolangun, Bupati, Kecamatan, Seluruh Kabupaten	DINAS PENDIDIKAN (DIKBUD)	Mengembangkan pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan pariwisata dan kebudayaan yang berkualitas dan berdaya saing dengan mengedepankan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya	Masyarakat		21.919.406,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak				1 Paket	11.000.000,00	Kab. Sorong Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Other Non-OAPs (ONOP) (Umum)	Mengurangi permasalahan kekerasan yang terjadi dengan mengedepankan upaya kekerasan dengan kekerasan dan kekerasan yang terjadi dan kekerasan	1. Peningkatan akses terhadap keadilan dan ketertiban masyarakat yang peduli dan terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum yang berkeadilan gender dan anak	Kabupaten		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SAMSUL DAN HUMAS
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Pelayanan Pengaduan Korban															
		Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani					1 Kasus	177.477.500,00	Kab. Sorong Semua Kecamatan Semua Kelurahan	ERNA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengurangi permasalahan kekerasan yang terjadi dengan mengedepankan upaya kekerasan dengan kekerasan dan kekerasan yang terjadi dan kekerasan	1. Peningkatan akses terhadap keadilan dan ketertiban masyarakat yang peduli dan terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum yang berkeadilan gender dan anak	Kabupaten		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SAMSUL DAN HUMAS
5.01.01.2.06.0005	Pemenuhan Hukum Korban Kekerasan dan Penanganan															

NO	KODE	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN AWAL PERUBAHAN OPD	REALISASI CAPAIAN S/D TRIWULAN OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET JIWA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											MANDATORI	PILIHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pasar Rakyat Lokasi yang Ditingkatkan Pengelolaannya				4 Pasar	10.800.000,00	Kab. Sampang Kecamatan Sampang Desa Karangdalem	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	Mempunyai pasar rakyat yang memiliki kriteria dengan tingkatan sedang atau buruk yang perlu adanya revitalisasi untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat	1. Mempunyai fasilitas pasar yang memiliki kriteria sedang atau buruk yang perlu adanya revitalisasi untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat 2. Mempunyai lahan yang memadai untuk pengembangan pasar rakyat	Kecamatan		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.01.01.06.0004	Pengelolaan Pasar Rakyat														
			Jumlah Kecamatan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Masyarakat yang Dilakukan				1 Kecamatan	21.600.000,00	Kab. Sampang Kecamatan Sampang Desa Karangdalem	Jawa Alokasi Umum (DAU)	Mempunyai pasar rakyat yang memiliki kriteria dengan tingkatan sedang atau buruk yang perlu adanya revitalisasi untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat	1. Mempunyai lahan yang memadai untuk pengembangan pasar rakyat 2. Mempunyai lahan yang memadai untuk pengembangan pasar rakyat	Kecamatan		21.600.000,00	Dinas Perdagangan dan Koperasi
	4.11.01.2.W.0005	Perencanaan Pasar Rakyat dan Kawasan Perdagangan														

NO	KODE	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN OPD TAHUN 2025	Catatan Hasil Reviu Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah				90 Layanan	242.874.776.00	Kab. Seluruh Kantor Kecamatan Seluruh Desa	DANA DAERAH (MURNI)	Mempunyai Sarana dan Prasarana yang memadai mengenai Bangunan dan Ruang Arsip dan Perpustakaan yang Representatif	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi kearsipan dan perpustakaan 13. Peningkatan Layanan dan Literasi (Data Dan Informasi)	Kabupaten		242.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.21.01.2.01	Pengadaan Jasa Pengelolaan Arsip Daerah Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Arsip Dinamis dan Statis				100 %	115.000.000.00			Mempunyai Sarana dan Prasarana yang memadai mengenai Bangunan dan Ruang Arsip dan Perpustakaan yang Representatif	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi kearsipan dan perpustakaan 13. Peningkatan Layanan dan Literasi (Data Dan Informasi)	Kabupaten		57.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.21.01.2.01.0001	Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kantor dan Sekretariat Lainnya														

(a)	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BAGI PERHITUNGAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											PENDORONG	PENGHAMBAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Barang dan Prasarana Perlengkapan yang Tersedia dan Terpelihara				Unit	[illegible]	Kab/ Semua Desa/ Kecamatan/ Semua Kel/Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Semua Jenis		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Kebersihan				12 Laporan	Rp 300.000.000	Kab. Sarolangun Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengelola sampah yang ramah lingkungan, termasuk pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan akhir sampah	1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3 melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3	Masyarakat	12 Dokumen	RATUSAN RIBU RUPIAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dan Perlengkapannya														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan Lainnya yang Disediakan				12 Laporan	Rp 439.139.000	Kab. Sarolangun Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengelola sampah yang ramah lingkungan, termasuk pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan akhir sampah	1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3 melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3	Masyarakat	12 Dokumen	RATUSAN RIBU RUPIAH
	5.01.01.2.06.0008	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Gedung														

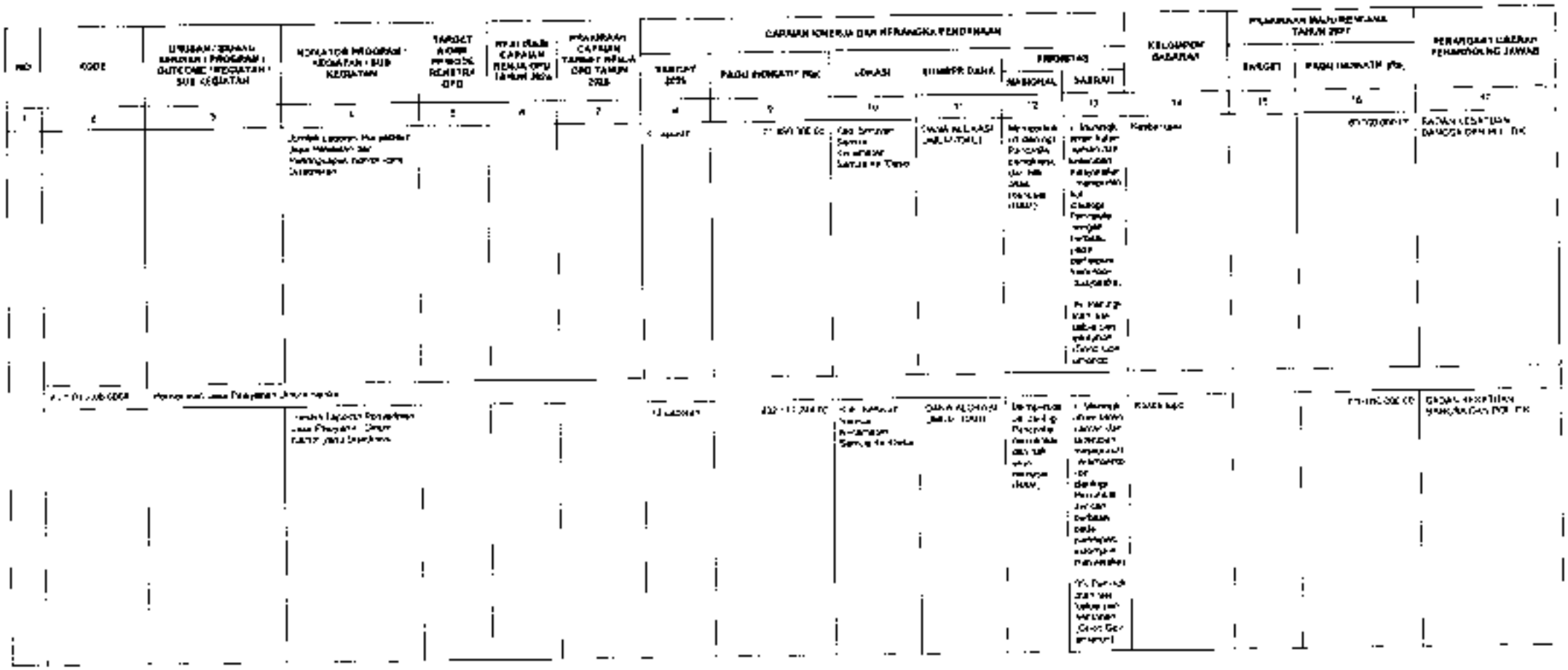

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD Tahun 2024	PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Alokasi Pagu Renstra Tahun 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Satuan 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	PROVINSI		KECAMATAN SASARAN	BAGIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.16	Penyediaan Sarana, Prasarana Olahraga Tingkat Lokal Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggara Olahraga pada Cabor Kegiatan Olahraga Prestasi/Unggulan Terdaftar yang Berkualitas				100 %	440.748.675,00			Mengelola pelayanan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (NSPK)	1. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas Lalu Mewujudkan pengguna sarana berbasis teknologi informasi yang berkualitas, transparan, akuntabel 25. Persentase sarana dan prasarana olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga)	Kecamatan		330.561.506,25	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PO (1.01
	1.01.01.2.16.0001	Penyediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Olahraga Tingkat Lokal Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kejuaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Lokal Akibat yang Diselenggarakan Pemerintah				17 Unit	81.187.181,00	Kab. Kerinci Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mengelola pelayanan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (NSPK)	1. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas, transparan, akuntabel, berbasis teknologi informasi 25. Persentase sarana dan prasarana olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga)	Kecamatan		110.187.302,08	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PO (1.01
	5.01.01.2.99.0008	Penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	POLA TAHAP CAPAIAN RENJA OPD TAHUN BERJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN (%)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BERJARA TAHUN TEST		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga yang Terdaftar				%	47.941.000,00	Kota Kawasan Sentuh Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung 30. Jaring Pengaman Sosial untuk RAW TAHUN	2. Mendukung JALAN SAM, mengurangi kemiskinan mengurangi kesenjangan mengurangi pengangguran 05. Mengurangi dan Lebih Merata Pemerataan Pembangunan		Kemiskinan		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.01.01.2.09.0003	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
			Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diterbitkan				%	1.884.925,00	Kab. Semua Desa/Kelurahan Seluruh Kab/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mendukung 30. Jaring Pengaman Sosial untuk RAW TAHUN	2. Mendukung JALAN SAM, mengurangi kemiskinan mengurangi kesenjangan mengurangi pengangguran 05. Mengurangi dan Lebih Merata Pemerataan Pembangunan		Kependudukan		19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	3.01.01	PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKOLOGIS PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang memahami pembangunan berbasis Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan				85 %	1.372.874.000,00							1.360.000.000,00	

NO	KODE	URAIAN SUB/KEGIATAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JUMLAH PERIODE sebelumnya	REALISASI CAPAIAN KINERJA SPD Tahun 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	RAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	RAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	RENJA Bab III CAPAIAN Kinerja OPD Tahun 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELANJA NON ASN Tahun 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Tahun Ke-N	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	JUMLAH DANA	PROVINSI	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Bidang Olahraga Prestasi, Rekreasi, Penyelenggara Jenis Kegiatan Kondisi Sangat, Pemerintah Kabupaten, Berada Tinggal Ini Dari Seperti Kabupaten				50 Orang	55.000.000	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa Kab Sanggau, semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengembangkan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat Kabupaten Sanggau	1. Mengembangkan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat melalui kegiatan Pembinaan olahraga prestasi (terdapat atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi) 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga (Cabor Gor)	Anak Usia Sekolah Dasar, Pra Pemuda, Pemuda, Lembaga dan Masyarakat		750.000.000	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
A.21.02.2.21.0005	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi di Kabupaten Sanggau															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Olahraga Prestasi Kabupaten, Dan Negara Adanya Rekreasi Pembinaan Kabupaten Sanggau Tinggal ini dan Seperti Kabupaten				3 Laporan	34.500.000,00	Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa Kab Sanggau Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengembangkan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat Kabupaten Sanggau	1. Mengembangkan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat melalui kegiatan Pembinaan olahraga prestasi (terdapat atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi) 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga (Cabor Gor)	Anak Usia Sekolah Dasar, Pra Pemuda, Pemuda, Lembaga dan Masyarakat		1.000.000.00	BADAN KEPENDUDUK DAN PEMBANGUNAN
A.21.02.2.21.0006	Penyelenggaraan Pemuda															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERKIRAAN MASUK PERUBAHAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PERSENTASE (%)	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KETERANGAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
		Urusan Pemerintah					11 Orang	1.194.879.224,00	Semua Kecamatan	DANA KELURAHAN (ADV) (DAU)	Mengurangi risiko bencana, termasuk bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, kekeringan, dan tanah longsor	2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim	Arah Luar Selatan Gunung Lintik Harus Sesuai Peruntukan Sebagai Kawasan				
5	0.00.00	PROGRAM PENDIDIKAN PEMDA PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PEMBERDAYA PEMILIH, DAN PEMANTAPAN KEHIDUPAN ETNIS SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mengetahui Pendidikan Politik dan Pola Budaya Politik				83 %	1.344.841.832,00								340.000.000,00	
	0.07.04.01	Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Politik dan Lembaga Pemberdayaan Pemilih dan Pemantapan Kehidupan Etnis serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pemantapan Kehidupan Etnis serta Budaya Politik Pada Partai Politik dan Lembaga Pemberdayaan Pemilih				100 %	1.344.841.832,00			Mengurangi risiko bencana, termasuk bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, kekeringan, dan tanah longsor	2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim	Kedua Arah Pada Kawasan			340.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	0.07.04.01.0002	Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Politik dan Lembaga Pemberdayaan Pemilih dan Pemantapan Kehidupan Etnis serta Budaya Politik Pada Partai Politik dan Lembaga Pemberdayaan Pemilih															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN LALU	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN BERJALAN	TARGET 2026	CADANGAN DANA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASUK RENCANA TAHUNTERT		MASYARAKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								PAGU INDIKATIF (Rp)	Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
			Jumlah Kelahiran di Seorang Kependudukan Kota Kota Kabupaten/Kota Pencatatan Sipil Kependudukan, Administrasi dan Pelaporan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah yang Wajib Pemerintah Wajib Kabupaten/Kota				5 Dokumen	50.000.000	Seluruh Kota/Kab. Seluruh Kecamatan Seluruh Kel/Desa Kab. Sarolangun Seluruh Kecamatan Seluruh Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mendukung pelaksanaan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2c. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	Kantor Pelayanan Publik Masyarakat		50.000.000,00	DAERAH KEGIATAN MANDIRI (DAK FISIK) Tim
P.01.03.2.01.0002	Pembinaan Kelembagaan Sistem Pengelolaan Publik - Unit Pelayan Publik Kelembagaan Pelayanan Publik, Pembinaan Kelembagaan Pelayanan Publik, Pembinaan Kelembagaan Pelayanan Publik, Pembinaan

NO	KODE	URAIAN (BIDANG URUSAN, PROGRAM) DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERKIRAAN MASA MENDATANG Tahun 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	Lokasi	SUMBER Dana	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	RPJMD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan di Balai Pendidikan Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten/Kota Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Kepala Balai Pendidikan				70 Orang	Rp 142.000.000	Balai Pendidikan Kecamatan Kabupaten Kota Kantor Kabupaten Kantor Gubernur Kota Kantor Kabupaten Kantor Kota Kantor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengurangi ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana dari pusat	1. Mewujudkan sistem kerja sama antar daerah dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan masyarakat 3. Mengembangkan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien (Good Governance)	Dinas Energi Sumber Daya Mineral		125.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI
	3.21.03.2.21.0003	Penerapan Manajemen Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Pembinaan dan Pelaporan di Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026				4 Laporan	Rp 120.000.000	Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan Kantor Desa Kantor Kabupaten, Kantor Kota Kantor Gubernur, Kantor Kementerian Dalam Negeri Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengurangi ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana dari pusat	1. Mewujudkan sistem kerja sama antar daerah dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan masyarakat 3. Mengembangkan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien (Good Governance)	Kantor Pusat Pemerintahan		62.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI
1	3.21.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PENCAMBAH PEMERINTAHAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang dan STC/APP dengan kegiatan				47,52 % 50 %	Rp 943.000.00							Rp 000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RPJMD PADA TAHUN 2024	PERANCANGAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANCANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026	PADU INTERNAL (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATOR	TARGET	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PADU INTERNAL (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemberian Pelayanan Administrasi Umum, Pembinaan Unsur Aparatur dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang memenuhi Administrasi untuk pendaftaran/SKT/Rekomendasi/Cek Kesehatan				32,50 %	Rp 640.000.000			Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel	2 Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang memadai mendukung pelayanan publik Bagian Pemerintahan yang Berkualitas pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung	Ormas dan LSM yang Menyelesaikan			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	0.01.04.2.01.0020	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Ormas, Pembinaan Ormas, Pengawasan Ormas, Evaluasi dan Laporan Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas yang di Danai														
			Jumlah Ormas yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan & Bantuan Operasional Ormas, Pembinaan Ormas, Fasilitasi Kemitraan Pengelola Ormas dan Ormas Asing & Hibah				192 Ormas	119.700.000,00	Seluruh Kecamatan Seluruh Kabupaten Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Cianjur • Seluruh Kecamatan • Kantor Kesbangpol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel	1 Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang memadai mendukung pelayanan publik Bagian Pemerintahan yang Berkualitas pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung	Ormas Yang Mengikuti Pembinaan			97.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	0.01.04.2.01.0021	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Ormas, Pembinaan Ormas, Pengawasan Ormas, Evaluasi dan Laporan Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas yang di Danai														

NO	KODE	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	DASAR HUKUM PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JUMLAH PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD Tahun 2025	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERKIRAAN BELUM TERCAPAI Tahun 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR	SUMBER DANA	PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Dinas Perpustakaan Dinas Provinsi dan Middle Sangatta Dinas Pengarsipan Dinas dan Lintas Jajaran di Daerah				30 Orang	16.800.000	Nilai Kepuasan Sarana Kompetensi Sumber Daya Manusia	Persentase (%) CAPAIAN CAKUPAN	Mengevaluasi rekomendasi publik hasil dari OPD/UPTD yang sesuai yang diberikan dan pemberian Jenis kunjungan ke OPD Dinas	7 Mendapat informasi kunjungan dari LEMBAGA PERPUSTAKAAN yang publik, Jumlah Pelayanan Mencapai dengan 2026 yang sesuai dengan Pelayanan 30 Mendapat 2027 ini belum dan sesuai Kinerja Dinas	Dinas, SKPD dan Masyarakat		47.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PPU
5.01.34.2.21.0004	Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum														
			Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Pengelolaan Dinas Perpustakaan Dinas Provinsi dan Middle Sangatta Dinas Pengarsipan Dinas dan Dinas Lainnya di Daerah				4 Layanan	15.867.800,00	Nilai Survei Sarana Kompetensi Sumber Daya Manusia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mengevaluasi rekomendasi publik hasil dari Mengenai, serta yang sesuai dan pemberian Jenis kunjungan perpustakaan yang	7 Mendapat informasi kunjungan dari LEMBAGA PERPUSTAKAAN yang publik, Jumlah Pelayanan Mencapai dengan 2026 yang sesuai dengan Pelayanan 30 Mendapat 2027 ini belum dan sesuai Kinerja Dinas	Dinas, SKPD dan Masyarakat		15.867.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	5.01.34.2.21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, sosial, Seni Budaya	Dalam Kewenangan Untuk Bertugas				4 Indeks	184.867.800,00							184.867.800,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PERUBAHAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2026	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2027	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN BELUM REVISI Tahun 2027		KETERANGAN DAERAH PEMANGKU JABATAN
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER	KUMULATIF	PROVINSI / DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						APLIKASI SASARAN	PERKIRAAN BELUM REALISASI TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET TAHUN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PROGRAM				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan di Balai Kecamatan (Orang) Sosial Budaya dan Pendidikan Kemasyarakatan/Penyuluhan Indikator Utama Meningkatnya Upaya Bangsa dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Daerah				90 Orang	47.000.000,00	Semua Desa/Kel. dalam Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Banyumas Jumlah Kecamatan Semua Kel/Desa	Dinas/Instansi/Unit/Lembaga (OPD)	Masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan pengembangan dan budaya masyarakat pada umumnya khususnya yang berminat untuk berpartisipasi dan	3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Desa dalam Aspek Pelestarian Nilai Budaya Untuk Bidang 03 Pemberdayaan pelestarian [Kecamatan]	Anak Sampah Orang Tua Muda Publik Lembaga dan Masyarakat			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.06.2.01.0005	Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Pelestarian Nilai Budaya Kebudayaan Olahraga, Sosial Budaya dan Pendidikan Kemasyarakatan/ Penyelenggaraan Kegiatan - Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan di Desa/Kel														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Sosial Budaya dan Pendidikan Kemasyarakatan/Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Kecamatan Desa Kelurahan dan Pengelola Kawasan di Daerah				4 Laporan	66.540.000,00	Semua Desa/Kel. dalam Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Banyumas, yaitu Kecamatan Semua Kel/Desa	Dinas/Instansi/Unit/Lembaga (OPD)	Masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan pengembangan dan budaya masyarakat pada umumnya khususnya yang berminat untuk berpartisipasi dan	3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Desa dalam Aspek Pelestarian Nilai Budaya Untuk Bidang 03 Pemberdayaan pelestarian [Kecamatan]	Anak Sampah Orang Tua Muda Publik Lembaga dan Masyarakat			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	6.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN HUBUNGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian Sasaran yang ditetapkan				100 %	112.631.000,00							146.304.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN, PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN AKHIR PERIODE OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET TERA	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible] %	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				2 Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]														

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN SEBELUM PERIODE RENSTRA	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERKIRAAN MULAI PERGESERAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							11 Orang	5.150.000.000	Seluruh Kabupaten/ Kota, Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mendukung terlaksananya program kerja, Terwujudnya pelayanan yang maksimal dan terlaksananya program kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan	1. Mendorong pelaksanaan program kerja dan terlaksananya program kerja yang maksimal dst. Seluruh pelayanan yang maksimal pada pelayanan kepada Masyarakat dst. Seluruh pelayanan yang maksimal dan terlaksananya program kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Orang yang Berada di Luar Kewenangan		15.500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
							41 Orang	7.150.000.000	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Mendukung terlaksananya program kerja, Terwujudnya pelayanan yang maksimal dan terlaksananya program kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan	1. Mendorong pelaksanaan program kerja dan terlaksananya program kerja yang maksimal dst. Seluruh pelayanan yang maksimal pada pelayanan kepada Masyarakat dst. Seluruh pelayanan yang maksimal dan terlaksananya program kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Orang yang Berada di Luar Kewenangan		15.500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URAIAN / SKOPING URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD Tahun lalu	PROPORSI CAPAIAN TARGET RENJA TAHUN INI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PERANGKAT DAERA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan dan monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Lapang Kewenangan Lain Yang Sama sebagai Pemerintah Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Asing Kewenangan Pemerintah atau Negara Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan yang Pelaporan Kerja di Daerah			4 Laporan	[illegible]	Seluruh Kecamatan Kab. Sragen Kecamatan Sambirejo	Dana ALOKASI UMUM-DAU	Mendukung : Indonesia politik luar negeri dan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis	7) Peningkatan akses dan pemerataan layanan dasar berkualitas [illegible] 8) Penguatan pelayanan dasar [illegible]	Orang, Kelompok, Unit dan Masyarakat		192.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	3.31.06.2.01.0006	Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Kewenangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Kewenangan Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota				7 Dokumen	14.146.000	Kab. Sragen Kecamatan Sambirejo Kecamatan Sambirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertahankan : Indonesia politik luar negeri dan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis	8 Penguatan pelayanan dasar [illegible] 7) Peningkatan akses dan pemerataan layanan dasar berkualitas [illegible]	Orang, Kelompok, Unit dan Masyarakat		84.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH						14.146.000							276.300.000	

BAB V
PENUTUP

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RENJA Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RENJA Tahun 2026 juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJPN dan RPJM Nasional serta RPJPD dan RPJMD Provinsi, Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-PD, KUA-PTAS, Renja-PD, DPA SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Rencana tindaklanjut dari rumusan RENJA Tahun 2026 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Rencana Operasional pada rencana Tahun Anggaran 2026.

Demikian RENJA Tahun 2026 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kuala Pembuang, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan,

LIPINUS, SE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770413 200604 1 013